

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang**

###### **1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Semarang**

Sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat lepas dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya<sup>70</sup>.

Pengadilan Agama Semarang berdiri dan ditetapkan pada tahun 1828 M bersama dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Semarang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat Pasar Johar dimana kantor tersebut berada di Serambi Masjid Agung Semarang atau dikenal dengan Masjid Besar Kauman. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan sidanganya biasanya dilakukan di serambi masjid, maka Pengadilan Agama Semarang juga disebut sebagai Pengadilan Surambi.

Pada masa Wali Kota Semarang Kolonel Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas ±4000 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Ronggolawe No. 6 Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama

---

<sup>70</sup> Pengadilan Agama Semarang, Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Semarang, Online: <http://www.pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarahpengadilan>, diakses pada 28 Februari 2021

Semarang. Luas bangunan yang dijadikan sebagai gedung Pengadilan Agama Semarang seluas 499 M<sup>2</sup> yang diresmikan pada tanggal 19 September 1978 yang pada saat itu H. Haun Rasyidi., SH menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Semarang<sup>71</sup>.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1987 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1997 tentang penetapan batas wilayah Kota Semarang, maka wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Semarang terdiri dari 16 wilayah Kecamatan yaitu, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Timur, Pedurungan, Gajah Mungkur, Banyumanik, Genuk, Mijen, Gunung Pati, Ngaliyan, Tugu, Gayamsari, Candi Sari, Tembalang dan terdiri dari 177 Kelurahan<sup>72</sup>.

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang**

### **a. Visi**

Visi Pengadilan Agama Semarang adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung”<sup>73</sup>.

### **b. Misi**

Misi Pengadilan Agama Semarang yaitu<sup>74</sup>:

---

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> Pengadilan Agama Semarang, Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Semarang, *Online*: <http://www.pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi>, diakses pada 28 Februari 2021

<sup>73</sup> Pengadilan Agama Semarang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang, *Online*: <http://www.pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses pada 28 Februari 2021

<sup>74</sup> *Ibid*

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadilan;
- 2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan; dan
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.

### **3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang**

Menurut Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan memeriksa perkara di tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Pengadilan Agama Semarang mempunyai fungsi, sebagai berikut<sup>75</sup>:

- a) Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
- b) Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
- c) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
- d) Fungsi Lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.

---

<sup>75</sup> Pengadilan Agama Semarang, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang, *Online*: <http://www.pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tupoksi>, diakses pada 28 Februari 2021

#### 4. Data Perceraian yang Diputus Pengadilan Agama Semarang pada Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 di Indonesia. Pengadilan Agama Semarang mencatat bahwa jumlah perceraian yang diputus Pengadilan Agama Semarang pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 3278 kasus dengan perincian cerai talak sebanyak 810 kasus, sedangkan cerai gugat sebanyak 2469 kasus<sup>76</sup>.

Tabel 3. 1 Perceraian di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2020

No.	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1.	Januari	88 kasus	276 kasus	364 kasus
2.	Februari	86 kasus	225 kasus	311 kasus
3.	Maret	45 kasus	126 kasus	171 kasus
4.	April	53 kasus	144 kasus	107 kasus
5.	Mei	20 kasus	64 kasus	84 kasus
6.	Juni	66 kasus	264 kasus	330 kasus
7.	Juli	89 kasus	237 kasus	326 kasus
8.	Agustus	88 kasus	254 kasus	342 kasus
9.	September	88 kasus	295 kasus	383 kasus
10.	Oktober	66 kasus	260 kasus	326 kasus
11.	November	90 kasus	274 kasus	364 kasus

<sup>76</sup> Laporan Tingkat Pertama Yang Diputus Pengadilan Agama Semarang Pada Tahun 2020

12.	Desember	31 kasus	50 kasus	81 kasus
Jumlah		810 kasus	2469 kasus	3278 kasus

Sumber: Pengadilan Agama Semarang

Adapun contoh putusan Cerai Gugat maupun Cerai Talak yang diputus Pengadilan Agama Semarang pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, sebagai berikut:

a. Kasus Cerai Talak Dalam Putusan No.2017/Pdt.G/2020/PASmg

Nama Pemohon Suami (disamarkan), usia 29 tahun, pekerjaan karyawan pabrik dengan Termohon Isteri (disamarkan), usia 32 tahun pekerjaan karyawan pabrik. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor: 2017/Pdt.G/2020/PA.Smg, tanggal 18 Juni 2020, dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa suami isteri melakukan perkawinan pada tanggal 20 November 2015. Semula antara suami isteri hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan kecemburuan yang disebabkan karena Pemohon masih memiliki dan menyimpan foto mantan kekasihnya di Laptop, apabila marah saling diam dan tidak ada komunikasi yang baik lagi dan Pemohon sudah tidak ada rasa cinta lagi. Puncak perselisihan dan “mengangkat panggilan telepon



Termohon, kemudian memblokir nomor WA Pemohon. Atas dasar tersebutlah yang menyebabkan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon.

Atas dalil tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dengan dalil dalam petitumnya meminta untuk Mengabulkan gugatan Penggugat, Menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Membebaskan biaya perkara menurut Hukum, atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas permohonan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, dan majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil.

Perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan putusan permohonan dapat diterima dengan pertimbangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon masih

menyimpan foto mantan kekasih Pemohon di laptop, kemudian apabila marah saling diam dan tidak ada komunikasi. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan. Selanjutnya akibat perselisih dan pertengkaranan tersebut, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Juli 2020 dan tinggal bersama dengan orang tua Pemohon. Kondisi tersebut merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menimbang bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak bisa diteruskan kembali, sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan dasar hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Semarang, menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah idah sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Mut'ah uang sebanyak Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan

membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

b. Kasus Cerai Gugat dalam Putusan No.1351/Pdt.G/2020/PASmg

Nama Penggugat Isteri (disamarkan), usia 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, dengan Tergugat suami (disamarkan), usia 25 tahun pekerjaan dosen swasta. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 1351/Pdt.G/2020/PASmg, tanggal 18 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada tanggal 15 Maret 2000 dan dikaruniai dua orang anak. Semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hanya di empat tahun pertama, namun sejak mengandung anak yang kedua Penggugat terus menerus mengalami tekanan batin yang hampir tiap hari Penggugat menangis dan Tergugat diam saja tidak merespon dan perhatian terhadap Penggugat, hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena pada tahun 2013 Penggugat pernah ditalak dan hampir bercerai dengan permasalahan yang sama dan di tahun 2016 hampir bercerai lagi dan akan membuat kesepakatan pisah di notaris tetapi belum terealisasi dan tahun 2020 ini, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk menandatangani surat kesepakatan pisah secara



damai yang bermaterai. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan suami tidak terbuka masalah keuangan dan kurang memberi uang belanja. Selain itu suami juga sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2020 disebabkan karena Tergugat tidak dapat berubah sehingga Tergugat akhirnya meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Atas dalil tersebut maka Penggugat mengajukan permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya mengatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Atas permohonan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim telah menempuh

prosedur Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil.

Perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan putusan bahwa mengabulkan gugatannya dengan pertimbangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka soal keuangan, sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Kondisi tersebut merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menimbang bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak bisa diteruskan kembali, sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut dengan dasar hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat kepada Penggugat dan membebaskan

biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

c. Kasus Cerai Gugat dalam Putusan No.1308/Pdt.G/2020/PASmg

Nama Penggugat Isteri (disamarkan), usia 23 tahun, pekerjaan *Sales Promotion Girls*, dengan Tergugat suami (disamarkan), usia 23 tahun pekerjaan karyawan pabrik. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 1308/Pdt.G/2020/PA.Smg, tanggal 15 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada tanggal 25 Juli 2018 dan telah dikaruniai satu orang anak. Dalam dalil gugatannya Penggugat mengatakan bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, disebabkan karena Tergugat selalu bersikap kasar dengan Penggugat, Tergugat jarang memberi nafkah dan jarang pulang kerumah dan puncaknya tepat pada tanggal 15 Mei 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama satu tahun.

Berdasarkan dalil tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu, Penggugat mohon

kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan yang amarnya mengatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Atas permohonan tersebut, Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya. Oleh karena itu atas ketidak hadiran Tergugat maka tidak dapat dilaksanakan mediasi.

Perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Desember 2020 dengan putusan bahwa gugatan perceraianya dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Dengan pertimbangan bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada, maka didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah, jarang di rumah dan puncaknya pada akhirnya tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama satu tahun. Kondisi tersebut merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menimbang bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak bisa diteruskan Kembali dan sudah tidak dapat

mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan dasar hukum alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

d. Kasus Cerai Gugat dalam Putusan No.2850/Pdt.G/2020/PASmg

Nama Penggugat Isteri (disamarkan), usia 34 tahun, pekerjaan buruh pabrik dengan Tergugat suami (disamarkan), usia 32 tahun pekerjaan tidak bekerja. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 2850/Pdt.G/2020/PASmg, tanggal 22 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut: Bahwa suami isteri telah melakukan perkawinan pada tanggal 20 Juni 2011 dan telah dikaruniai dua orang anak. Semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan



suami jarang melaksanakan kewajiban untuk beribadah dan ketika dinasehati justru marah, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat jarang memberi nafkah untuk keluarga dan Tergugat sering mabuk-mabukan. Puncak pertengkaran tersebut terjadi sejak September 2020 karena Tergugat jarang memberi nafkah dan sulit dinasehati agar melaksanakan sholat, sehingga sejak September 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya. Disamping itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Penggugat sudah tidak mencintai lagi terhadap Tergugat, dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk kumpul kembali dengan Penggugat, segala macam nasehat sudah dilakukan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan dalil tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan yang amarnya mengatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Atas permohonan tersebut, Tergugat

tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya. Oleh karena itu, atas ketidak hadiran Tergugat maka tidak dapat dilaksanakan mediasi.

Perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Desember 2020 bahwa gugatan perceraianya dapat diterima dengan pertimbangan bahwa dalam sidang perceraian sampai dengan tahap akhir persidangan Tergugat tidak pernah hadir yang disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, maka putusan atas perkara tersebut dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Selain itu berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada, maka didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat bahwa semua rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 dan puncaknya pada September 2020, terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah dan Tergugat sering mabuk-mabukan, yang sangat dibenci Penggugat. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada itikad baik untuk kumpul kembali, sementara keluarga Penggugat sudah mengusahakan untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Kondisi tersebut merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menimbang bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak bisa diteruskan kembali, sehingga

keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan dasar hukum alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

## **B. Pembahasan**

### **1. Faktor yang Menjadi Alasan-Alasan Penyebab Perceraian yang Dilakukan pada Masa Pandemi Covid-19**

Pada dasarnya faktor yang menyebabkan perceraian sangat unik dan kompleks. Setiap rumah tangga pasti memiliki permasalahan dalam rumah tangga yang berbeda-beda.

Pandemi Covid-19 membawa dampak dan perubahan yang menyeluruh terhadap kehidupan manusia. Dengan bertambahnya kasus masyarakat yang tertular virus Covid-19 maka kegiatan yang biasanya dilakukan diluar rumah harus dilakukan di rumah, seperti pekerjaan, sekolah, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, orang-orang lebih sering menghabiskan waktunya di dalam dirumah bersama keluarga

dibandingkan diluar rumah, sehingga intensitas bersama keluarga menjadi meningkat.

Dengan adanya peningkatan intensitas keluarga pada masa pandemi Covid-19 tentunya dapat memberikan dampak positif maupun negatif dalam kehidupan rumah tangga. Dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan hubungan antar anggota keluarga sehingga dapat meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga, sedangkan dampak negatif dengan adanya peningkatan intensitas keluarga tersebut dapat berakibat pada peningkatan konflik dalam rumah tangga<sup>77</sup>.

Selain dampak di atas, pandemi Covid-19 turut meruntuhkan struktur ekonomi yang telah berjalan sebelumnya. Runtuhnya struktur ekonomi tersebut memberi dampak dan perubahan yang hebat dan berkepanjangan terhadap aktivitas ekonomi, ketenagakerjaan dan perdagangan<sup>78</sup>. Akibat dari kebijakan tersebut, maka banyak tempat usaha yang gulung tikar, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), karyawan yang dirumahkan, pengurangan jam karyawan yang terkait erat terhadap lemahnya posisi karyawan terhadap kebijakan pengurangan karyawan disaat banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan penjualan akibat kebijakan pemerintah pemberlakuan PSBB<sup>79</sup>.

---

<sup>77</sup> Anggi Yus Susilowati, dan Andi Susanto, 2020, "Strategi Penyelesaian Konflik dalam Keluarga di Masa Pandemi Covid-19." *Hasanuddin Journal of Sociology*, 88-97.

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> *Ibid*

Permasalahan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pula pada kondisi mental seseorang, situasi keuangan mereka, dan juga keberlangsungan rumah tangganya. Hal tersebut dikarenakan permasalahan finansial yang diperparah dengan kondisi mental individu yang tidak stabil akan mengakibatkan hubungan yang kurang sehat pada pasangan, sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya perceraian<sup>80</sup>. Bahkan karena permasalahan finansial, tidak jarang seseorang lebih memilih bercerai daripada mempertahankan rumah tangganya, mengingat begitu sulitnya memelihara rumah tangga apabila kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan tidak terpenuhi dengan baik<sup>81</sup>.

Bapak Munadi selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang mengatakan bahwa:

“Faktor yang mengakibatkan perceraian pada masa pandemi Covid-19 sangatlah kompleks dan kebetulan krusialnya dalam mengajukan gugatannya terjadi pada masa pandemi Covid-19. Dengan banyaknya masyarakat yang terkena PHK, pengurangan jam karyawan, tempat usaha seperti tempat makan, mall, perkantoran, dll terpaksa harus ditutup mengakibatkan ekonomi keluarga tidak stabil, sedangkan kebutuhan sehari-hari semakin meningkat, dan bantuan pemerintah tidak memadai, sehingga isteri harus mencari tambahan penghasilan untuk menambal kebutuhan sehari-hari. Namun relasi yang terbentuk dalam pembagian peran antara suami dan isteri tersebut menjadi tidak seimbang lantaran isteri tetap membereskan pekerjaan rumah, membantu anaknya yang sekolah daring sehingga menyebabkan beban isteri semakin meningkat, sedangkan suami yang enggan membantu. Situasi tersebutlah yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran

---

<sup>80</sup> Apriasari, Hastinia., Qotrunnada, K., Al-Jannah, F. M., & Amani, Z, 2021, Divorce In The Covid-19 Pandemic Era: An Integrative Study. In *Proceding Of Inter-Islamic University Conference On Psychology* (Vol. 1, No. 1)

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Nurokhid, S.H., M.H. pada 2 April 2021



dalam rumah tangga yang dapat berujung perceraian, sedangkan faktor lainnya seperti perselingkuhan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain, moral, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, komunikasi yang tidak baik, tidak mencintai dan menyayangi lagi, cemburu, ekonomi, dll”<sup>82</sup>.

Selanjutnya, Bapak Saefudin selaku Panitera Muda Hukum

Pengadilan Agama Semarang menegaskan bahwa:

“Rata-rata perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang pada masa Pandemi Covid-19 disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran dengan sebanyak 2238 kasus, sedangkan faktor lainnya disebabkan karena meninggalkan salah satu pihak sebanyak 404 kasus, ekonomi sebanyak 129, sisanya karena KDRT, madat, judi, murtad, dan lain-lainnya”<sup>83</sup>.

Beliau juga mengatakan bahwa:

“Perceraian yang terjadi pada masa pandemi Covid-19, pada umumnya mereka sudah memiliki permasalahan sebelum adanya pandemi Covid-19 dan puncaknya terjadi pada masa pandemi Covid-19. Ketika permasalahan yang sebelumnya belum terselesaikan dengan baik ditambah dengan hubungan antar pasangan yang tidak baik, emosi yang tidak stabil, dan permasalahan-permasalahan baru yang kian banyak yang tidak menemukan ujung penyelesaiannya, maka situasi tersebutlah yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang berujung perceraian atau dapat terjadi karena sudah terjadi sebelum adanya pandemic”<sup>84</sup>.

Menanggapi beberapa pendapat tersebut, menurut penulis bahwa pandemi Covid-19 memang memberi dampak luar biasa terhadap kehidupan manusia termasuk kehidupan berumah tangga. Akan tetapi, pandemi Covid-19 tidak serta merta menjadi alasan seseorang melakukan

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. H. Munadi, M.H, selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 26 Maret 2021

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Saefudin, S.H, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 26 Maret 2021

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Saefudin, S.H, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 26 Maret 2021

perceraian. Hal tersebut dikarenakan mereka yang bercerai pada masa pandemi sudah memiliki permasalahan dalam rumah tangga sebelum adanya pandemi Covid-19 dan puncaknya terjadi pada masa pandemi Covid-19 atau puncak permasalahan tersebut terjadi sebelum pandemi Covid-19 akan tetapi keputusan untuk memutuskan bercerai terjadi di masa pandemi Covid-19.

Untuk menguatkan argumen tersebut, maka berikut adalah beberapa putusan yang diputus Pengadilan Agama Semarang pada masa Pandemi Covid-19 yaitu dalam Putusan No.2017/Pdt.G/2020/PA. Smg, Putusan No.1351/Pdt.G/2020/PA. Smg, Putusan No.1308/Pdt.G/2020/PA. Smg, dan Putusan No.2850/Pdt.G/2020/PA. Smg.

Tabel 3. 2 Faktor-Faktor yang Menjadi Alasan Penyebab Perceraian

Perkara	Faktor-Faktor yang menyebabkan perceraian
Cerai Talak Putusan No. 2017/Pdt.G/ 2020/PA.Smg, Diajukan pada 18 Agustus 2020	1. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena: a. Kecemburuan Termohon (isteri) yang dikarenakan Pemohon (suami) masih menyimpan foto mantannya di Laptop; b. Perbedaan pendapat; c. Tidak adanya komunikasi yang baik antara suami isteri.

	<p>2. Pemohon (suami) tidak mengangkat panggilan telepon Termohon, sehingga Termohon memblokir nomor WA Pemohon.</p> <p>3. Pemohon (suami) sudah tidak bisa mencintai dan menyayangi dengan sepenuhnya.</p> <p>4. Pemohon (suami) pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Juli 2020</p>
<p>Cerai Gugat Putusan No. 1351/ Pdt. G/ 2020/ PA.Smg Diajukan pada 16 Juni 2020</p>	<p>1. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang terjadi setelah empat tahun pertama perkawinan (2004) yang disebabkan karena sejak mengandung anak yang kedua Penggugat terus menerus mengalami tekanan batin hingga sampai sampai sekarang. Penyebabnya adalah karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tergugat (suami) tidak terbuka masalah keuangan;</li> <li>b) Uang belanja yang kurang;</li> <li>c) Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati.</li> </ul> <p>2. Tahun 2013 penggugat (isteri) pernah ditalak dan hampir bercerai dengan permasalahan yang sama.</p> <p>3. Tahun 2016 hampir bercerai lagi dan akan membuat kesepakatan pisah di notaris tetapi belum terealisasi.</p>

	4. Pada bulan Mei 2020 Tergugat meninggalkan rumah.
<p>Cerai Gugat</p> <p>Putusan No.</p> <p>No.1308/Pdt.G/</p> <p>2020/PASmg</p> <p>Diajukan pada</p> <p>11 Juni 2020</p>	<p>1. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan karena:</p> <p>a) Tergugat (suami) bersikap kasar</p> <p>b) Jarang memberi nafkah,</p> <p>c) Jarang pulang kerumah.</p> <p>2. Pada tanggal 15 Mei 2019 Tergugat (suami) pergi tanpa adanya alasan yang jelas.</p>
<p>Cerai Gugat</p> <p>Putusan No.</p> <p>1308/Pdt.G/</p> <p>2020/PASmg</p> <p>Diajukan pada</p> <p>22 Oktober</p> <p>2020</p>	<p>1. Ketidakharmonisan Dalam rumah tangga yang dimulai sejak empat tahun perkawinan (2013) dikarenakan:</p> <p>a) Tergugat (suami) jarang melaksanakan kewajiban untuk beribadah dan ketika dinasehatin marah,</p> <p>b) Tergugat (suami) berkata kasar</p> <p>c) Jarang memberi nafkah untuk keluarga</p> <p>d) Tergugat (suami) sering mabuk-mabukan.</p> <p>2. Sejak September 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.</p> <p>3. Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri.</p>

	4. Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat,
--	--

Sumber: Pengadilan Agama Semarang

Apabila dijabarkan faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga tersebut menunjukkan adanya:

#### 1. Kecemburuan

Cemburu merupakan tanda adanya rasa cinta dan kasih sayang. Sifat cemburu merupakan sifat yang wajar yang dimiliki setiap manusia, akan tetapi tidak menutup kemungkinan apabila seseorang memiliki rasa cinta yang sangat mendalam akan berakibat rasa cemburu yang sangat hebat melebihi batas cemburu pada umumnya, hal inilah yang tidak wajar. Akibat dari cemburu yang berlebihan tersebut dapat mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, hilangnya rasa percaya terhadap pasangan, rasa menghargai satu sama lain dan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang antar pasangan, sehingga yang ada hanyalah rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan, bahkan akibat terburuknya yaitu hancurnya rumah tangga yang ditandai dengan adanya perceraian. Hal tersebut juga terjadi pada Putusan No. 2017/Pdt.G/ 2020/PA.Smg dimana kecemburuan tersebut disebabkan karena isteri mengetahui bahwa yang suami masih menyimpan foto mantannya di Laptop.

#### 2. Komunikasi yang kurang baik



Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah hubungan keluarga untuk membangun kepercayaan dengan pasangan. Kurangnya komunikasi menyebabkan segala hal yang diinginkan sulit untuk tercapai. Buruknya jalinan komunikasi antar pasangan akan mengakibatkan mudah timbulnya kesalahpahaman antar pasangan. Kesalahpahaman menjadi kunci utama terjadinya pertengkaran yang bisa berakibatkan buruknya kehidupan berumah tangga, sehingga rentan terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Hal tersebut terjadi pada Putusan No. 2017/Pdt.G/ 2020/PA. Smg dimana di dalam gugatan tersebut disebabkan karena kesalahpahaman antar pasangan yang disebabkan karena komunikasi antar pasangan kurang baik, seperti contohnya apabila marah antara suami isteri tidak adanya komunikasi yang baik langsung memblokir kontak WA pasangan.

### 3. Hilangnya rasa cinta dan sayang antar pasangan

Rasa kasih dan sayang merupakan pondasi awal dalam membangun rumah tangga karena rasa cinta dan sayang menjadi perekat dalam kehidupan berumah tangga, sehingga membutuhkan dua hati untuk tetap bersemi dan terus bertahan. Dalam beberapa kasus banyak pasangan yang merasa bahwa rasa cinta dan kasih sayang antar pasangan semakin luntur seiring berjalannya waktu yang disebabkan karena komunikasi yang buruk, terlalu sering berselisih dan bertengkar, dan faktor lainnya, sehingga ketika salah

satu pihak atau para pihak mengetahuinya bahwa ternyata sudah tidak memiliki rasa cinta lagi maka perceraian mudah terjadi karenanya.

#### 4. Ketidakharmonisan

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan keselarasan yang tercipta antara suami isteri yang dapat dilihat dari komunikasi, penyesuaian diri dalam memberikan perhatian dan pengertian, sehingga terciptanya kebahagiaan yang ditandai dengan kurangnya ketegangan antar pasangan karena buruknya komunikasi, kurangnya kekecewaan-kekecewaan terhadap pasangan yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran. Penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga bisa dipicu oleh masalah keuangan, adanya gangguan pihak ketiga, akhlak yang buruk, komunikasi yang kurang baik, sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran.

#### 5. Permasalahan ekonomi

Ekonomi merupakan kebutuhan yang tidak luput untuk mempertahankan hidup. Permasalah ekonomi bisa disebabkan oleh dua hal yaitu pihak isteri selalu merasa kurang atas apa yang diberikan oleh suami dan menuntut untuk diberi nafkah yang lebih karena merasa bahwa kebutuhan dalam rumah tangga semakin banyak dan semakin mahal dan bertambah., dan yang kedua adalah suami kurang mengemban amanah yang sudah menjadi kewajibannya untuk mencari nafkah akan tetapi nafkah yang

seharusnya diberikan isteri hanya dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri. Hal tersebut terjadi dalam Putusan No.1351/Pdt.G/2020/PA. Smg karena ketidak terbukaannya masalah keuangan dan pihak isteri mengaku bahwa suami kurang dalam memberi uang belanja mengingat kebutuhan semakin bertambah, Putusan No.1308/Pdt.G/2020/PA. Smg disebabkan karena suami jarang memberi nafkah, dan Putusan No.2850/Pdt.G/2020/PA. Smg karena suami jarang memberi nafkah.

#### 6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mendefinisikan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan verbal maupun nonverbal. Kekerasan verbal dapat berupa ucapan maupun kekerasan psikis/ emosional, sehingga mengakibatkan penderitaan secara psikis karena tindakan yang mengendalikan, manipulasi, eksploitasi, perendahan, penghinaan, pelarangan, dan

lain sebagainya, sedangkan kekerasan nonverbal merupakan kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, contohnya: menampar, memukul, meludahi, menarik rambut, menendang, memukul/ melukai dengan senjata dan sebagainya.

Dari beberapa putusan di atas kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam Putusan No. 1308/Pdt.G/ 2020/PASmg, Putusan No. No.1308/Pdt.G/ 2020/PASmg dan Putusan No. 1351/ Pdt. G/ 2020/ PA.Smg dimana dalam dalil gugatannya mengatakan bahwa suami sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati. Sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati tersebut merupakan bentuk kekerasan verbal.

#### 7. Pemabuk

Pemabuk dapat dijadikan alasan hukum bagi suami isteri yang hendak melakukan perceraian. Definisi pemabuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang suka atau biasa mabuk, sedangkan mabuk berarti berasa pening atau hilang kesadaran (karena terlalu banyak minum minuman keras, makan gadung, dan sebagainya), berbuat di luar kesadaran, lupa diri, sangat gemar (suka), tergila-gila; sangat berahi<sup>85</sup>.

Mabuk merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum islam dan juga hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan

---

<sup>85</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mabuk>, Diakses pada tanggal 15 September 2021

dengan adanya kebiasaan mabuk, maka dapat kerugian fisik maupun psikis. Kerugian fisik tersebut dapat berupa kerusakan pada organ dalam tubuh, sedangkan kerugian psikis dapat hilangnya kontrol kesadaran sehingga tidak bisa menggunakan akal fikiran secara jernih akibat pening yang ditimbulkan, sehingga dapat membahayakan dirinya bahkan orang lain. Biasanya pemabuk akan menjadi pribadi yang suka marah, gampang tersinggung dan malas untuk melakukan aktivitas termasuk untuk bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, apabila seseorang suami memiliki kecenderungan suka mabuk-mabukan akan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, sehingga tidak jarang akibat hal tersebut mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan berujung perceraian. Hal tersebut juga terjadi dalam Putusan No. 1308/Pdt.G/2020/PASmg, dimana dengan kepribadian suami yang sering mabuk-mabukan mengakibatkan melalaikan kewajibannya sebagai suami, seperti jarang memberi nafkah, jarang menjalankan kewajibannya sebagai orang muslim yaitu ibadah, menjadi pemaarah.

8. Pasangan yang sering mengabaikan atau melalaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak

Pasangan yang sering mengabaikan atau melalaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak merupakan bukti bahwa kurang bertanggung jawabnya suami atau isteri dalam



mengemban amanat, sehingga terjadinya disfungsi peran sebagai suami isteri. Hak-hak dan kewajiban tersebut termuat dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 77 sampai Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban tersebut adalah bahwa suami berkewajiban untuk membimbing isterinya dan mengenai hal-hal urusan yang penting diputuskan secara bersama, melindungi isterinya, memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya, memberi pendidikan agama kepada isteri dan memberi kesempatan pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa, memberi nafkah sesuai dengan penghasilannya serta menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak, dan biaya pendidikan anak, sedangkan Isteri berkewajiban untuk berbakti kepada suaminya baik lahir maupun batin yang dibenarkan oleh hukum islam, menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut terjadi dalam Putusan No.1308/Pdt.G/2020/PA. Smg, dan Putusan No.2850/Pdt.G/2020/PA. Smg. Dimana dalam putusan dalam Putusan No.1308/Pdt.G/2020/PA. Smg mengatakan bahwa suami jarang memberi nafkah dan jarang pulang kerumah dan dalam Putusan No.1308/Pdt.G/2020/PA mengatakan bahwa suami pemabuk, suami jarang melaksanakan kewajiban untuk beribadah

dan ketika dinasehati marah, sering berkata kasar, jarang memberi nafkah untuk keluarga.

9. Meninggalkan salah satu pihak

Meninggalkan pihak lain tanpa adanya alasan yang jelas menunjukkan secara tegas bahwa antar suami isteri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana menjadi suami isteri, baik secara lahir maupun batin. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga karena telah hilangnya perasaan cinta dan sayang, sehingga tega menelantarkan atau mengabaikan hak suami atau isteri yang ditinggalkannya. oleh karena itu, maka perceraian dalam hal ini merupakan solusi untuk keluar dari rumah tangga baik secara hukum formal ada akan tetapi dalam faktanya sudah tidak ada lagi. Hal tersebut termuat dalam Putusan No.2017/Pdt.G/2020/PA. Smg, Putusan No.1351/Pdt.G/2020/PA. Smg, Putusan No.1308/Pdt.G/2020/PA. Smg, dan Putusan No.2850/Pdt.G/2020/PA. Smg bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri mengakibatkan meninggalkan salah satu pihak.

Faktor-faktor di atas merupakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelum adanya pandemi Covid-19 dan puncaknya terjadi pada masa pandemi Covid-19 atau puncak dari permasalahan tersebut terjadi sebelum adanya pandemi Covid-19 akan tetapi

keputusan untuk memutuskan bercerai terjadi di masa pandemi Covid-19. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, hilangnya rasa percaya terhadap pasangan, rasa menghargai satu sama lain dan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang antar pasangan, sehingga yang ada hanyalah rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus berlangsung, mengakibatkan perkawinan tersebut menjadi kehilangan makna sebagaimana yang diinginkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1: “Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal” dan dengan ditandai salah satu pihak sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya (sudah meminta cerai), maka sudah dapat dikatakan bahwa antara suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud surat Ar-Rum ayat 21:

Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar cenderung merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

## **2. Pandangan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Keterkaitan Faktor yang Menjadi Alasan-Alasan Penyebab Perceraian yang Dilakukan pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Semarang**

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, oleh karena itu perceraian diatur dalam hukum perkawinan. Dalam makna yang lebih luas, Hukum perceraian merupakan bagian bidang hukum keperdataan, oleh karena itu hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum keperdataan.

Menurut Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan suci, agung dan kokoh, antara seorang pria dan wanita sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, untuk hidup bersama sebagai suami isteri<sup>86</sup>. Al-Qur'an menyebutkan dengan kata-kata "*Mitsaqan ghaliza*" atau perjanjian yang suci dan mulia<sup>87</sup>. Dikatakan sebagai perjanjian karena termasuk pengikatan sebab akibat dimana dalam perkawinan tersebut telah diatur adanya cara untuk mengadakan ikatan dan cara untuk menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian<sup>88</sup>.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 atau bisa disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

---

<sup>86</sup> Mardani, *Op.Cit*, hlm. 25

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> *Ibid*

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka tujuan perkawinan sangatlah ideal. Hal tersebut dibuktikan bahwa tujuan perkawinan bukan hanya ikatan lahirnya saja tetapi mencakup ikatan batin juga sebagai pondasi yang kuat dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal. Namun sering kali dalam kenyataannya perjalanan kehidupan rumah tangga tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia, meskipun sudah diusahakan sedemikian rupa dan dengan penuh kehati-hatian tidak jarang dalam suatu perkawinan yang sudah berjalan bertahun-tahun dapat berakhir dengan perceraian.

Dalam hukum Islam memperbolehkan terjadinya perceraian, akan tetapi bukan berarti seseorang dengan mudah melakukan perceraian. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa “Perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak (cerai)”<sup>89</sup>. Perceraian memang dibenci Allah, akan tetapi apabila dengan mempertahankan perkawinan lebih banyak mudaratnya (keburukannya) daripada manfaatnya, maka perceraian tersebut diperbolehkan<sup>90</sup>.

Dilihat dari sisi sebab-sebab atau maslahat dan *mudharatnya*, hukum perceraian dalam hukum islam dibagi menjadi 5 (lima). Hukum

---

<sup>89</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Op.Cit*, hlm. 256

<sup>90</sup> Muhammad syaifuddin Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Op.Cit*, hlm 22



perceraian menjadi wajib apabila apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak dapat didamaikan. dan perceraian karena telah bersumpah tidak mencampuri isteri<sup>91</sup>. Makruh karena perceraian tersebut tanpa adanya hajat. Perceraian ini sebaiknya tidak dilakukan namun apabila dilakukan diperbolehkannya, misalnya menceraikan isteri yang memiliki akhlak baik<sup>92</sup>. Sunnah karena suami atau isteri melalaikan hak dan kewajibannya, tidak ada kecenderungan hati kepada isteri, karena perintah salah satu dari orang tua yang bukan memberatkan, karena buruknya akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersama maka dengan ini perceraian dianjurkan<sup>93</sup>. Mubah karena perceraian tersebut didasari dengan adanya kebutuhan, misalnya menceraikan isteri yang tidak di cintai atau tidak disukainya lagi sehingga suami tidak mau menyetubuhinya dan tidak memberi nafkah, karena buruknya isteri, dan karena isteri dirugikan tanpa adanya perceraian<sup>94</sup>. Dan yang terakhir, haram karena mentalak isteri tanpa adanya alasan yang jelas<sup>95</sup>.

Secara yuridis perceraian juga bukan sebuah larangan, namun sebagai solusi atau alternatif terakhir dalam mengatasi permasalahan dalam rumah tangga yang tidak terselesaikan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 atau biasa disebut sebagai Undang-undang perkawinan

---

<sup>91</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Op. Cit.* hlm. 259

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 258

<sup>93</sup> *Ibid*

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 260

<sup>95</sup> Djamal Latief, *Op. Cit.*, hlm. 50

merupakan payung hukum bagi seseorang yang ingin melakukan perceraian.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan antara suami isteri. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian,
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan tersebut menunjukkan adanya<sup>96</sup>:

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan isteri;
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan isteri karena ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Peristiwa hukum tersebut adalah kematian;
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan dan berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri.

Secara umum tidak ada satu pun orang yang menginginkan adanya perceraian dalam rumah tangga, melainkan hal yang didambakan adalah keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal maka dibutuhkannya kerjasama antara suami dan isteri, sikap saling menghargai dan menghormati, saling percaya, mengasihi satu sama lain, sehingga keserasian dan keharmonisan dalam

---

<sup>96</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Op.Cit*, hlm.16

rumah tangga terbentuk. Akan tetapi, apabila hal tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, maka dapat mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga yang berujung perceraian.

Rumah tangga dikatakan pecah (*broken marriage*) apabila sudah terdapat banyak konflik sehingga tidak dapat membangun komunikasi yang efektif lagi, para pihak tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Apabila Perkawinan tersebut dipaksakan untuk diteruskan, maka perkawinan tersebut justru akan membuat para pihak merasa tersiksa dan perkawinan tersebut menjadi kehilangan makna sebagaimana yang diinginkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga apabila salah satu pihak sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka sudah dapat dikatakan bahwa antara suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Berdasarkan uraian di atas, maka tidaklah mustahil apabila didalam masyarakat di jumpai kehidupan perkawinan dimana terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk, bahkan tidak jarang dengan sedemikian buruknya tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga

dirasa bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi. Dengan merasa bahwa kehidupan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan lagi oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka alasan tersebut sudah dapat menjadi alasan pokok perceraian.

Telah diketahui bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal, akan tetapi perlu diketahui bahwa kebahagiaan tidak dapat dipaksakan, karena dengan memaksa kebahagiaan bukanlah kebahagiaan yang didapatkan akan tetapi sebuah penderitaan<sup>97</sup>. Dari ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perceraian merupakan satu-satunya jalan terbaik bagi suami isteri yang mengalami permasalahan rumah tangga yang tidak terselesaikan atau dengan kata lain bahwa hikmah perceraian adalah membuka pintu keselamatan dari kerusakan menuju kebaikan<sup>98</sup>.

Perlu diketahui, meskipun perceraian diperbolehkan bukan berarti seseorang dapat dengan mudah melakukan perceraian karena Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersulit perceraian. Asas mempersulit perceraian tersebut termuat dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

---

<sup>97</sup> Djamal Latief, *Op. Cit*, hlm.30

<sup>98</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan *Op. Cit*, hlm 22

3. Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Sebagai pelaksana dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, adapun alasan-alasan perceraian tersebut dijabarkan kembali dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sebagai berikut:

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa adanya alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain;
- e) salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan tersebut juga dijabarkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan adanya tambahan alasan perceraian

- g) suami melanggar taklik talak; dan
- h) Peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi alasan-alasan penyebab perceraian yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 dalam Putusan No.2017/Pdt.G/2020/PA. Smg, Putusan No.1351/Pdt.G/2020/PA. Smg, Putusan No.1308/Pdt.G/2020/PA. Smg, dan Putusan



No.2850/Pdt.G/2020/PA. Smg, maka pertimbangan hakim yang digunakan adalah:

a. Putusan No.2017/Pdt.G/2020/PA. Smg

Pertimbangan hakim yang digunakan adalah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal tersebut didasarkan pada dalil gugatan, bukti maupun fakta fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon masih menyimpan foto mantan kekasih Pemohon di laptop, kemudian apabila marah saling diam dan tidak ada komunikasi. Faktor tersebut merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terdapat konflik, sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Juli 2020. Kondisi tersebut merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menimbang bahwa rumah

tangga keduanya sudah tidak bisa diteruskan kembali dan tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1996 No. 534/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996 dikatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcon atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang harus dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* bahwa: “menolak kerusakan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan”.

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi alasan perceraian sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon (suami), menurut penulis merupakan kategori faktor yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

oleh karena itu, penulis sependapat dengan yang dikemukakan hakim di atas.

b. Putusan No.1351/Pdt.G/2020/PA. Smg

Pertimbangan hakim yang digunakan adalah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal tersebut didasarkan pada dalil gugatan, jawaban penggugat yang menolak sebagian gugatan penggugat, bukti berupa buku nikah dan dua orang saksi dari penggugat, sedangkan tergugat tidak menghadirkan saksi untuk mendukung dalil gugatan, maupun fakta-fakta di persidangan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka soal keuangan, sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Kondisi tersebut merupakan indikasi bahwa antara penggugat dan tergugat sudah terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat

menghindarkan diri dari perselisihan dan pertengkaran. Bukti akibat tergugat meninggalkan diri dari tempat kediaman bersama cukup lama merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menimbang bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak bisa diteruskan kembali, sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1996 No. 534/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996* dikatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang harus dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* bahwa: “menolak kerusakan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan”.

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi alasan perceraian sebagaimana yang disampaikan oleh penggugat (isteri), menurut penulis merupakan kategori faktor yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan yang dikemukakan hakim di atas.

c. Putusan No.1308/Pdt.G/2020/PA. Smg

Pertimbangan hakim yang digunakan adalah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada, maka didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah, jarang di rumah dan puncaknya pada akhirnya tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama satu tahun. Kondisi tersebut merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menimbang bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak bisa diteruskan kembali dan sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.



Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan dasar hukum alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Alasan bahwa suami jarang memberi nafkah, jarang di rumah dan pergi meninggalkan isteri dan anak selama satu tahun merupakan bukti bahwa kurang bertanggung jawabnya suami dalam mengemban kewajibannya, sehingga terjadinya disfungsi peran sebagai suami isteri. Alasan tersebut dapat dikategorikan alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam apabila dalam perkawinan adanya perjanjian perkawinan yang diucapkan setelah akad nikah atau disebut dengan istilah "*sighat taklik talak*", yang berisikan bahwa apabila suami:

1. Meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan dan jasmani isteri
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri daya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Akan tetapi, dalam perkawinan tersebut antara suami isteri tidak adanya perjanjian *sighat taklik talak*, sehingga perceraian tersebut tidak dapat dikategorikan dalam alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan keputusan majelis

hakim, bahwa perceraian tersebut diputus dengan alasan hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa karena faktor-faktor tersebut mengakibatkan antara suami dan isteri terus menerus mengalami perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

d. Putusan No.2850/Pdt.G/2020/PA. Smg

Pertimbangan hakim yang digunakan adalah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada, maka didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2013 dan puncaknya pada September 2020, terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah, sering mabuk-mabukan, yang sangat dibenci Penggugat. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada itikad baik untuk kumpul kembali, sementara keluarga Penggugat sudah mengusahakan untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Kondisi tersebut merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menimbang bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak bisa diteruskan kembali, sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1996 No. 534/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996 dikatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang harus dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil *mudharatnya* daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* bahwa: “menolak kerusakan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan”.

Menanggapi pertimbangan hakim di atas, maka menurut penulis dalam hal suami pemabuk dapat juga dikategorikan dalam alasan hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk

disembuhkan. Oleh karena itu tidak ada salahnya disamping merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga merujuk pada Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, meskipun alasan perselisihan dan pertengkaran sudah terbukti.

Dari penjelasan keempat putusan di atas, maka keterkaitan faktor yang menjadi alasan-alasan penyebab perceraian tersebut adalah karena perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, perselisihan adalah persengketaan yang harus diputuskan lebih dahulu sebelum perkara pokok dapat diadili dan diputus, sedangkan pertengkaran adalah perdebatan, dan perdebatan.

Hukum islam menyebutkan istilah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagai *syiqaq*. *Syiqaq* timbul apabila antara suami isteri tidak melaksanakan kewajiban yang harus ditanggungnya. Hukum *syiqaq* dalam perceraian menjadi wajib apabila tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak. Alasan *syiqaq* dalam hukum islam termuat juga dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dalam Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan, bahwa *syiqaq* merupakan salah satu alasan perceraian.

Istilah perselisihan dan pertengkaran dalam Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Undang-

Undang Perkawinan merupakan satu kesatuan, sehingga tidak dapat menjadi alasan perceraian hanya terjadi perselisihan, melainkan juga terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Secara terus menerus berarti terjadinya pengulangan terhadap perselisihan dan pertengkaran sehingga diantara keduanya tidak menemukan penyelesaiannya. Oleh karena itu, maka perlu adanya hakam untuk menjadikannya sebagai juru damai, sehingga jika terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak semestinya langsung mengajukan perceraian, akan tetapi bisa ditempuh dengan berbagai cara seperti mendatangkan hakam keluarga untuk menengahi permasalahan. Akan tetapi, jika dari hakam keluarga sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, barulah para pihak dapat mengajukan perceraian di depan sidang Pengadilan dan hakim pengadilan dapat menjadi mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak. Untuk mencapai itu semua, maka sebelum menunjuk hakam dari keluarga maupun pengadilan, suami harus terlebih dahulu mengadakan usaha-usaha, baik dengan cara menasehati isteri, memisahkan tempat tidur, dan jika kedua cara tersebut belum juga terselesaikan suami dapat memberi peringatan akan tetapi masih dalam batas-batas wajar<sup>99</sup>. Sebaliknya isteri dapat mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan dengan alasan *syiqaq*.

---

<sup>99</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2019. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 20-21



Dalam praktik di Pengadilan Agama, alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dalam Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan dapat dikatakan *syiqaq* apabila alasan perceraian didasarkan pada fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami isteri dan sudah terjadi pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Apabila perceraian hanya didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur membahayakan dan belum sampai pada keadaan yang darurat, maka hal tersebut belum bisa dikategorikan sebagai alasan perceraian *syiqaq*. Dari penjelasan tersebut, maka *syiqaq* adalah perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak sehingga membahayakan jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, sehingga akan menimbulkan *kemudharatan*. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* bahwa: “menolak kerusakan itu didahulukan daripada meraih kemaslahatan.

Dalam hal gugatan tersebut hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian apabila selama dalam proses sidang di pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara mereka, namun tidak berhasil. Hal tersebut ditandai dengan salah satu pihak atau kedua pihak tetap pada pendirian untuk bercerai. Keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa antara suami isteri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun. Kondisi tersebut juga menjadi bukti bahwa telah pecahnya rumah tangga antara keduanya, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila dari proses awal mengajukan gugatan sampai dengan proses akhir para pihak dapat membuktikan dalil gugatannya dengan cara memberi bukti berupa dokumen pendukung perceraian ditambah dengan dua orang saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui permasalahan dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka hakim berhak memutus perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

